

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya perkembangan sektor publik saat ini di Indonesia, menjadikan pemerintah memerlukan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah atas kinerja yang telah dilakukan dan pedoman kerja yang diberikan, sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan masyarakat. Akibatnya, setiap instansi milik pemerintah wajib mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya secara jelas dan terbuka sehingga pemerintah daerah dapat dinilai dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Sejak pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjadikan maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan Pemerintahannya sendiri, termasuk mengenai keuangan daerah. Pemerintah Republik Indonesia juga telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang pada bidang keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Negara. Banyak sekali Pemerintah Daerah yang masih mengandalkan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan berbagai kepentingan, Misalnya pemerintah daerah dengan berbagai

kepentingan, Misalnya: pemerintah daerah menyediakan berbagai laporan keuangan yang disajikan dengan kualitas yang tinggi. Menurut PP No. 71 tahun 2010. Di dalam proses pengelolaan laporan keuangan daerah, suatu instansi pemerintah harus menyusun laporan keuangan dengan semaksimal mungkin yang sesuai dengan standart keuangan yang ada, agar memberikan hasil pengelolaan laporan keuangan yang efektif.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi tertulis yang berisi mengenai keuangan pemerintah daerah pada suatu periode akuntansi, akuntabilitas dan transparansi adalah sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik, karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian pada *Good Governance*. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu laporan keuangan pemerintah daerah meliputi beberapa hal antara lain : (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih, (3) Neraca, (4) Laporan operasional, (5) Laporan arus kas dan (6) Laporan perubahan ekuitas, (7) Catatan atas laporan keuangan.

Istilah laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Laporan keuangan menurut PSAK No.1 Laporan keuangan adalah penyajian tersruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan juga harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Selain itu dengan adanya laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan di dalam suatu perusahaan sehingga memberikan manfaat bagi sejumlah yang memakainya dalam sebuah pengambilan keputusan. Namun tidak semua laporan keuangan menyediakan semua informasi yang ada karena mungkin dibutuhkan waktu dalam pengambilan keputusan ekonomi sebab secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan juga kejadian pada masa lalu, sehingga tidak diwajibkan untuk menyediakan sebuah informasi (Ikatan akuntan Indonesia, 2012).

Sedangkan Menurut (Rohman,2016), karakteristik laporan keuangan berkualitas merupakan laporan keuangan yang memiliki ciri memberikan informasi keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dan standar kualitas yang harus dipenuhi adalah:

- a. Dapat Dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan atau Reliabilitas
- d. Dapat dibandingkan

Sebab kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi (Tjiptono,2015). Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur, yaitu

mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan (Fajri, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebuah informasi yang memiliki nilai informasi yang berkualitas dan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, dan laporan keuangan dikatakan baik apabila laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para penggunanya secara maksimal untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah perencanaan juga dalam mengambil keputusan.

Sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Nusation, *Et all*, 2016)

Hal senada juga dipaparkan oleh (Baldrick,2015) pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara itu menurut (Yusuf,2013) mengemukakan bahwa: Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca atau laporan posisi keuangan daerah, dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari semua proses dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan sebagai sistem informasi pelaporan keuangan. Kabupaten Jombang telah menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai sub sistem yang ada di alam SIMDA. SIMDA yang di terapkan oleh OPD Jombang yaitu SIMDA keuangan sebab untuk membantu mengelola data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut. OPD menerapkan SIMDA sejak diciptakannya SIMDA pada tahun 2008 namun SIMDA digunakan mulai tahun 2009. Diawal penerapannya system ini masih menemui beberapa kendala di dalamnya seperti *Humen eror* (Jaringan internet, alat – alat yang ada). Salah penganggaran (teknis yang terkait dengan proses penginputan data sampai dengan pelaporan keuangan) Integerasi (Masih mencocokkan beberapa secara manual) namun meskipun sering mengalami beberapa

kendala output yang bisa dihasilkan dari sistem ini adalah laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dari pada menggunakan penyusunan secara manual. Sehingga untuk mengetahui SIMDA sudah sesuai dengan aturan keuangan yang ada di pemerintahan daerah dalam mengelola laporan keuangan, pelaporan secara efektif dan juga efisien sehingga dapat mempermudah tugas keuangan, sistem yang diterapkan bertujuan untuk mendapatkan serta mencapai tujuan di dalam pelaporan yang diinginkan guna mengetahui kualitas informasi yaang di hasilkan oleh sistem tersebut.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sangat berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dengan adanya sistem informasi manajemen daerah dan penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) daerah, di dalam setiap pembuatan laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan akan memiliki dampak yang efektif pada setiap ketepatan waktu misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan dengan semaksimal mungkin yang sesuai dengan standar, yang bisa diandalkan oleh penggunanya. Implementasi SIMDA juga digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh suatu laporan keuangan dan informasi keuangan yang di inginkan dalam pemerintah daerah, selain itu laporan keuangan yang diperoleh juga akan sesuai, tepat waktu, komplit, dan akurat serta sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pemerintahan.

SIMDA keuangan sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan secara cepat, efektif, dan efisien yang sesuai

dengan peraturan didalam perundang undangan mulai dari penyusunan anggaran, penata usahaan dan peranggungjawaban kepada *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (APBD) (Lynda, *Et all* 2019).

Aplikasi SIMDA dapat di implementasikan sebagai pengelolaan keuangan dengan secara terintegrasi di OPD yang sesuai dengan standar SAP dengan di dukung sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, sehingga dengan adanya SIMDA mempunyai beberapa keuntungan yaitu seperti: pengendalian transaksi yang terjamin, efesiensi di dalam melakukan penata usahaan, sebab hanya membutuhkan satu kali input data pada transaksi, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, biaya yang terjangkau, cepat, serta akurat dalam menghasilkan sebuah informasi di dalam laporan keuangan (Tisnawati, 2018 ).

Selain itu pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA sangat berbeda dengan sistem yang dulu dimana dulu pembuatan laporan keuangan masih menggunakan sistem manual, dan saat ini pembuatan laporan keuangan menggunakan sistem yang sangat bagus yang mampu membantu dalam hal pembuatan laporan keuangan menjadi lebih efektif.

Seperti yang dijelaskan berdasarkan PP Nomor 192 Tahun 2014 penggunaan SIMDA seperti: Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai (Wibisono, 2018).

Dengan demikian tujuan pengembangan SIMDA adalah untuk menyediakan database mengenai kondisi di daerah kepegawaian atau aparatur daerah maupun

pelayanan publik, menghasilkan informasi yang Komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah, oleh karena itu, program aplikasi sistem informasi manajemen sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah daerah karena bisa meningkatkan kinerja keuangan ( Hashim, *Et all*, 2012).

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan Sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur berbasis kadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Ariesta,2013).

Selanjutnya dikatakan lagi bahwa pengertian sumber daya manusia adalah sebuah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya (Hasibuan,2012)

Kemudian dipaparkan oleh (Aulia,*Et all*,2019) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Sedangkan Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi (Lubis, *Et all*, 2015). Selain itu hal senada disampaikan bahwa: Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi (Sidaburar,2018).

Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi dapat membantu organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan handal dalam bekerja, Melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pelatihan, kompetensi SDM akan lebih optimal dan berujung pada meningkatnya kinerja Organisasi melalui serta operasionalisasi visi dan misinya. Sumber daya manusia didalam suatu organisasi adalah sebagai penggerak aktivitas, sebab tanpa sumber daya manusia maka tidak akan ada aktivitas yang dapat berjalan secara sesuai dengan pencapaian dan tujuan yang ada didalam organisasi, karena sumber daya manusia disebut sebagai tenaga kerja atau karyawan. Sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang, pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan (Wansyah, *Et all*, 2012).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia adalah individu - individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi. Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah: Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah

Sesuai dengan PP No. 71 pada bagian SAP adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun (Firmanda,2017) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tekhnologi sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas pada aktivitas yang ada di dalam organisasi. Dengan adanya fenomena yang ada pada laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data – data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan – penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) sehingga meningkat. Dan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Menindak lanjuti dari penelitian Simanjutak tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo” Menyatakan bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui penerapan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA untuk variabel X1 dan juga sama – sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah untuk variabel Y.

Sedangkan di penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana peneliti sebelumnya menggunakan variabel (X) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) namun dipenelitian ini untuk variabel (X) yang digunakan yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, selain itu di penelitian ini juga terdapat pembaharuan terhadap sistem yang akan diteliti yaitu SIPD, sehingga penelitian ini akan menjadi berbeda dengan penelitian - penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan sebuah usulan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang?
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jombang
2. Untuk menganalisis apakah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas berpengaruh terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Jombang
3. Untuk menganalisis apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jombang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang studi akuntansi dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya dengan Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Kemudian dengan hasil penelitian ini akan di kaitan dengan teori–teori yang sudah ada untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, dan bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sumber referensi maupun acuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian – penelitian selanjutnya mengenai SIMDA.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dan di jadikan sebagai salah satu masukan serta perubahan dan pertimbangan bagi instansi, Opd dan juga sebagai masukan selanjutnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, kualitas sdm yang sesuai dengan simda dan penerapan sap yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 1.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus tahun 2022 di BPKAD Kabupaten Jombang. Berikut skema penelitian yang disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 1.1  
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan 2022					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Pengajuan judul						
	b. Penyusunan Proposal						
	c. Perizinan Penelitian						
2	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data						
	b. Pengolahan dan analisis data						
3	Tahap Penyusunan Laporan						